

ABSTRAK

Dalam pasar dalam negeri terdapat berbagai macam produk baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Berbagai produk yang masuk dalam pasar Indonesia menyebabkan terjadinya persaingan yang kadang mengarah pada terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Menanggapi hal tersebut pemerintah mengeluarkan UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk dapat mengontrol perilaku pelaku usaha. Dibentuknya UU No. 5/1999 ini bertujuan untuk melindungi kesejahteraan rakyat berdasar pada demokrasi ekonomi. Lebih lanjut pemerintah untuk menjamin kesejahteraan rakyat membuat sebuah kebijakan, salah satunya tentang kebijakan impor daging kerbau.

Namun tidak setiap kebijakan sejalan dengan aturan perundang-undangan, kebijakan impor daging kerbau yang dilakukan Bulog dapat terindikasi melanggar pasal penetapan harga dalam UU No. 5/1999. KPPU sebagai lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan UU tersebut dapat bertindak sebagai penasihat kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan aturan dalam UU No.5/1999 berkaitan dengan pasal 35 huruf e sehingga tujuan dari pemerintah yang melindungi persaingan di pasar dengan mengeluarkan kebijakan dapat bersinergi dengan UU yang ada.

Keyword : persaingan usaha, pemerintah, kebijakan, penetapan harga

ABSTRACT

In the domestic market there are various kinds of products both from domestic and abroad. The product range included in the Indonesian market led to competition sometimes leads to the occurrence of unfair business competition. In response, the government issued UU No. 5/1999 regarding Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition to be able to be controlled the behavior of businesses. The establishment of UU No. 5/1999 aims to protect the welfare of the people, based on economic democracy. Further the government to guarantee the welfare of the people make a policy, one of the buffalo meat import policy.

But not every policy in line with the rules of law, policy import buffalo meat is done Badan Urusan Logistik (BULOG) can be indicated pricing violated article in UU No. 5/1999. The Commission as the institution charged with overseeing the implementation of the Act may act as an adviser to the government policy that is inconsistent with the rules in UU No.5 / 1999 concerning Article 35 letter e so, the purpose of government is to protect competition in the market by issuing a policy can synergize with the law.

Keyword: competition, government, policy, pricing